

BAB V

MODEL PENDIDIKAN DEMOKRASI SEBAGAI TEMUAN PENELITIAN

5.1 Deskripsi

Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa tujuan pokok dari studi ini adalah mendapatkan model pendidikan demokrasi yang secara empirik signifikan dan dapat diaplikasikan dalam setting interaksi pendidikan yang dialogis. Prosedur mendapatkan model tersebut dilakukan dengan mengembangkan model hipotetis yang dibangun melalui serangkaian prosedur sejak studi awal, termasuk pengumpulan informasi dan kajian kepustakaan. Model hipotetis yang berhasil dibangun itu kemudian diuji coba melalui serangkaian prosedur validasi, dan terakhir dilakukan eksperimentasi untuk mendapatkan signifikansi kesahihannya secara empirik dalam bentuk pengujian lapangan operasional.

Model temuan ini adalah hasil penyempurnaan dan penghalusan dari model hipotetis yang telah diuji dalam proses tersebut di atas. Penyempurnaan dan penghalusan dilakukan berdasarkan data dan masukan yang terkumpul, baik melalui proses validasi dalam bentuk expert judgement, uji coba lapangan terbatas, maupun data empirik yang didapat melalui uji empirik dalam bentuk penelitian ekperimental

pada tahap pengujian lapangan operasional. Penyempurnaan dan penghalusan antara lain dikenakan pada aspek-aspek: (1) asumsi-asumsi model, yang merupakan dimensi filosofis model, (2) deskripsi isi model yang dipreskripsikan, dan (3) implementasinya dalam satuan program pembelajaran.

Melalui rangkaian prosedur tersebut, disusunlah model pendidikan demokrasi dengan sistematika : (1) asumsi-asumsi model, (2) pendekatan pelaksanaan model pendidikan, (3) tujuan penerapan model, (4) deskripsi isi dan cara kerja model, (5) prasyarat penerapan model, dan (6) keterbatasan model.

5.2 Komponen Model

Masing-masing komponen model seperti disebutkan di atas, dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Asumsi-asumsi Model

(1) Keluarga dan sekolah merupakan arena utama dalam proses pendidikan.

Interaksi yang terjadi antar anggota dalam keluarga tidak hanya hubungan antar orang, akan tetapi lebih dari itu merupakan suatu set hubungan antar anggota dan dengan lingkungan yang mengelilinginya secara berkelanjutan. Paolucci, Hall, dan Axinn (1977:15) menyebut



keluarga sebagai suatu ekosistem yang dinamis dan adaptif dalam lingkungan yang didalamnya terbentuk kerja sama yang mendukung. Keluarga juga disebutnya sebagai unit korporasi yang didalamnya terdapat hubungan saling bergantung. Seorang anggota keluarga seringkali tak memiliki fungsi tanpa dukungan yang lain. Hubungan saling mendukung itulah yang membentuk nilai-nilai tertentu melalui interaksi antar anggota keluarga.

Pembentukan nilai-nilai dalam keluarga merupakan proses pendidikan yang dialami dengan sendirinya atau yang biasa disebut secara "*autonomous learning*" bagi para anggotanya. Diakui bahwa dimensi pendidikan dalam keluarga begitu luas. Sikap dan perilaku demokratis adalah salah satu nilai yang relevan dan amat penting yang berada di dalamnya. Termasuk dalam proses pendidikan itu adalah perbedaan persepsi yang menurut Paolucci, Hall, dan Axinn (1977:55) merupakan faktor penting dalam belajar. Stimulus yang didapat seseorang menentukan besarnya kesempatan untuk mendapatkan variasi pengalaman orang itu serta membentuk persepsi yang adjustif terhadap situasi yang baru. Intensifikasi hubungan dalam keluarga akan memberikan kesempatan yang lebih luas sebagai arena yang utama bagi para anggotanya untuk mengalami pendidikan seperti itu.

Sementara itu, sekolah merupakan arena utama dalam proses pendidikan seseorang, kekuatannya terletak pada disediakannya sarana

fisik, non fisik, dan fasilitas yang dirancang secara sengaja dan terencana untuk melaksanakan program pendidikan. Dalam beberapa hal, sekolah melengkapi kekurangan yang ada pada keluarga. Dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, keluarga tidak mungkin lagi memenuhi semua tuntutan kebutuhan dan aspirasi generasi muda, terutama berkaitan dengan kebutuhan akan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, secara hipotetis diakui bahwa semakin maju suatu masyarakat akan semakin penting peranan sekolah.

Salah satu tuntutan yang seharusnya diakomodasikan sekolah ialah tuntutan akan fungsinya sebagai pusat pendidikan untuk menyiapkan manusia Indonesia sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia di masa depan. Kompetensi yang dibutuhkan untuk itu adalah mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia (seperti dikehendaki pasal 3 UU No. 2 Tahun 1989 tentang SPN). Untuk mengimplementasikan misi ini, pendidikan sekolah dirancang secara sistematis (by design), dan inilah yang merupakan kelebihan pokok jika dibandingkan dengan keluarga. Rancangan sistematis inilah yang menghasilkan kompetensi tertentu baik kompetensi yang secara langsung dirancang (instructional effect) melalui tujuan khusus pembelajaran, maupun dampak pengiring (nurturant effect) yang

menyertainya. Dampak pengiring pada umumnya terjadi berkat keterlibatan subjek didik yang terjadi secara bermakna dalam suatu pengalaman belajar tertentu. Intervensi model pendidikan ini diasumsikan amat relevan untuk mencapai kedua dampak yang dihasilkan itu.

Kedua seting pendidikan itu (baik dalam keluarga maupun sekolah) masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Karena itu, keduanya juga diasumsikan dapat berperan untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Pada saat yang sama keduanya dapat menampilkan kelebihannya masing-masing pula, untuk kepentingan pendidikan.

(2) Keluarga sebagai kelompok primer dalam masyarakat, merupakan bentuk mini dari masyarakat.

Model ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa keluarga adalah unit terkecil yang merupakan kelompok primer dalam masyarakat. Dengan asumsi ini, maka secara hipotetis dapat dikemukakan bahwa tujuan hidup bermasyarakat akan tercapai melalui pencapaian tujuan keluarga. Dengan demikian, kita tidak dapat mengharapkan wujud masyarakat yang demokratis, apabila unit terkecilnya, yaitu keluarga tidak hidup dalam nilai-nilai yang demokratis. Potensi strategis yang dimiliki keluarga ini seharusnya

didayagunakan agar memberi kontribusi maksimal dalam pencapaian tujuan Pendidikan IPS, sebagaimana dianjurkan oleh Sunal (1991:298) yang menegaskan bahwa Pendidikan IPS dimulai dari rumah dan dilanjutkan di rumah. Faktor-faktor keluarga memiliki pengaruh yang besar sekali dalam pendidikan IPS bagi anak-anak dan remaja.

Berbagai metode mengajar yang efektif yang biasanya berbeda dengan metode pembelajaran di sekolah ternyata banyak digunakan dalam pendidikan IPS di rumah dan dalam masyarakat. Sunal menyebut beberapa metode yang banyak digunakan tersebut, antara lain pemodelan, pembelajaran langsung (*direct instruction*), pelatihan, simulasi, perbandingan masalah/fenomena, permainan interaktif, supervisi, dan pembelajaran tak langsung melalui kecenderungan/keterpengaruh yang menjadi dasar pembentukan watak (*predispositions*).

Dalam keluarga sebenarnya dikembangkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Paolucci, Hall, dan Axinn (1977:65-66) menyebutkan tiga tipe dasar nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan keluarga, yang ternyata sarat akan nilai-nilai demokarsi, yaitu: (1) nilai-nilai kepribadian (*personal values*), (2) nilai-nilai moral (*moral values*), dan (3) nilai-nilai sosial (*social values*). Nilai-nilai moral menurutnya mencakup nilai benar dan salah, nilai tanggung jawab

terhadap kehidupan yang dilindungi oleh kebebasan dan hak-hak azasi manusia.

Nilai-nilai itu diwujudkan dalam sikap kejujuran (*honesty*), saling ketergantungan (*dependability*), toleran, kedamaian berfikir (*peace of mind*), memiliki rasa keterbukaan (*sense of fair play*) integritas (*integrity*), memiliki perhatian (peka) terhadap kesenjangan (*concern for long-range benefits*), dan konsistensi antara pemikiran yang ideal dan perbuatan nyata (*consistency between one's ideals and actions*). Sedangkan nilai-nilai sosial mencakup nilai kerja sama (*cooperation*), pengakuan/penghargaan (*recognition*), kebebasan (*independence*), keadilan (*justice*), kebaikan (*benecolence*), kesamaan (*equity*), persesuaian/kecocokan (*conformity*), penghargaan terhadap hukum (*respect for law*), dukungan terhadap peranan mayoritas (*acceptance of majority rule*), rasa saling membutuhkan (*sense of interdependence*, dan pengakuan/penghargaan terhadap harga diri dan martabat setiap orang (*recognition of the worth and dignity of every human being*).

Dengan asumsi ini, maka mestinya dalam keluarga berjalan proses transformasi nilai-nilai tersebut yang merupakan bagian dari pendidikan. Lagi-lagi perpaduan dan kerja sama keluarga dengan sekolah amatlah penting mengingat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekolah memang mestinya menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakatnya.

- (3) Pendidikan sikap dan perilaku demokrasi perlu dilakukan sedini mungkin

Pendidikan demokrasi tidak harus menunggu ketika seseorang aktif menjadi kader suatu organisasi politik atau organisasi masyarakat tertentu. Bersikap demokratis merupakan wujud akumulasi dari pengalaman dan pengetahuan serta proses sosialisasi yang dialaminya selama hidup. Karena itu pendidikan demokrasi sangat dianjurkan untuk dimulai sedini mungkin, sehingga seseorang subjek memiliki peluang untuk menimba pengalaman yang lebih banyak.

Pendidikan demokrasi dalam keluarga dan di sekolah adalah bagian dari pengembangan kepribadian yang pelaksanaannya haruslah dimulai sedini mungkin. Keluarga dapat merupakan wahana pembelajaran yang efektif untuk membentuk pribadi-pribadi yang demokratis, manakala suasana kehidupan keluarga sehari-hari juga berjalan secara demokratis. Para pakar pendidikan pada umumnya sepakat bahwa untuk melahirkan generasi yang bersikap dan berperilaku demokratis, hendaknya dilakukan pendidikan demokrasi sedini mungkin.

Pendidikan dini sangat efektif dilakukan dalam keluarga. Interaksi antar anggota keluarga yang didominasi oleh suatu pihak tertentu secara otoriter sudah harus diubah menjadi interaksi keluarga yang diwarnai dengan suasana dialogis yang demokratis. Setiap anggota

keluarga hendaknya diakui keberadaannya oleh anggota lain dalam keluarga. Penerapan teknik dan prosedur dalam model pendidikan demokrasi ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya menyediakan wahana dan sebagai laboratorium bagi pengembangan sikap dan kepribadian yang demokratis itu.

(4) Perubahan sosial melalui strategi reedukasi adalah cara efektif.

Model pendidikan demokrasi ini juga didasarkan pada asumsi bahwa perubahan sosial melalui strategi reedukasi merupakan cara yang efektif. Perubahan sosial menurut Soemardjan dalam Pelly dan Menanti (1994:189) adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Cakupan perubahan sosial meliputi berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, ekonomi, hukum, teknologi. Sebaliknya, perubahan sosial yang terjadi dapat hanya meliputi bidang tertentu saja dan terbatas pula ke dalamnya.

Sementara itu, menurut Zaltman dan Duncan (1977), perubahan sosial dapat berlangsung secara top down dengan cara-cara tertentu yang cenderung menggunakan power, atau secara persuasi atau juga melalui strategi reedukasi (*reeducative strategies*). Pendidikan demokrasi yang berlangsung secara sinergis antara keluarga/masyarakat dan sekolah

merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang secara terarah berlangsung melalui strategi reedukasi. Menurut Zaltman dan Duncan (1977), strategi reedukasi (*reeducative strategies*) merupakan upaya sengaja untuk perubahan sosial yang dimulai dengan menyelenggarakan pendidikan terhadap khalayak sasaran. Strategi reedukasi itu dilakukan melalui perubahan pengetahuan dan membangkitkan kesadaran kritis pada diri khalayak sasaran, yang dengan pengetahuan baru dan kesadaran kritisnya itu mereka melakukan perubahan sosial secara sukarela dan rasional.

5.2.2 Pendekatan model pelaksanaan pendidikan

Model pendidikan demokrasi ini menganut beberapa pendekatan pendidikan yang secara teoretis telah diakui sebagai pendekatan yang lebih bermakna dan efektif, antara lain :

(1) Pendekatan Pendidikan yang berpusat pada aktifitas subjek didik

Pendidikan yang berpusat pada aktifitas subjek didik diselenggarakan antara lain dengan model interaksi pembelajaran yang menempatkan subjek didik sebagai komponen yang utama. Artinya, setiap langkah yang ditetapkan, baik yang bersifat prosedural dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi maupun pemanfaatan sumber daya pembelajaran dan pendidikan haruslah mempertimbangkan subjek

didik sebagai komponen utama yang sedang melakukan tindakan belajar untuk mencapai tujuan.



Pendekatan ini sering diumpamakan seperti proses pemeliharaan tumbuh-tumbuhan, yang menempatkan pemeliharaan tanaman sebagai pemelihara yang menyirami, menyiangi rumput dan memberantas hama di sekitar tanaman dan tindakan lain yang bersifat mendorong tumbuh kembangnya tanaman, sedang tanaman tumbuh dengan sendirinya dan atas dorongan dan upaya yang dilakukan pemelihara. Dengan demikian berbeda sekali dengan pendekatan yang berpusat pada pendidik, yang sering diumpamakan seperti orang menuang teh ke dalam gelas. Dalam hal ini subjek didik diumpamakan sebagai gelas yang secara pasif menerima tuangan seberapa mau pihak yang menuangkannya.

(2) Pendekatan Pengalaman

Pada prinsipnya, melalui model ini subjek didik melakukan tindak belajar berdasarkan pengalamannya sendiri. Dengan mengatribusikan sikap dan perilaku demokratisnya, subjek didik memperoleh pengalaman yang luas dalam bentuk perubahan orientasi mengenai konsep-konsep berkaitan dengan nilai demokrasi. Demikian pula dengan pemahaman terhadap tingkat asertivitas yang dimilikinya, kemudian merefleksi berdasarkan referensi yang didapatkannya melalui dialog, seseorang akan lebih mampu menempatkan dirinya dalam konteks interaktif di masyarakat. Ia akan menghindarkan diri dari

perilaku yang agresif, dan pada saat yang sama akan pembelajaran sedang berlangsung untuk memperbaiki perilaku yang sub-misif.

Dengan model ini mereka akan mengalami perubahan orientasi nilai dan pengetahuan yang terakumulasi dalam bentuk sikap dan perilaku demokratis, sedang tingkat perubahannya akan sangat ditentukan oleh seberapa besar mereka mengatribusikan pengalaman masa lalunya itu.

(3) Pendekatan Problem (Problem Approach)

Dari segi bentuk pokok bahasan, model ini berdasarkan pada masalah yang disajikan untuk ditanggapi dan dianalisis. Pendekatan seperti ini oleh Barr, Barth dan Shermis (1978) disebutnya sebagai pendidikan IPS yang menggunakan pendekatan problem (*problem approach*). Dengan pendekatan ini, titik berat diletakkan pada pelacakan berbagai segi yang membentuk masalah. Pendekatan ini secara khusus digunakan untuk mendekati masalah yang diangkat dari kancan masyarakat, biasanya berupa *current problems* atau *current issues* yang berkembang dalam masyarakat.

Masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi dan penerpannya di masyarakat, senantiasa menjadi perhatian yang sangat umum di tengah-tengah masyarakat, terlebih pada saat sekarang ini. Dalam hal ini isu paling santer yang berkembang dalam masyarakat kita adalah belum mantapnya sikap demokratis yang dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Karena itu isu ini amat relevan

bila diangkat sebagai *current issues/problems* sebagai bahan pembelajaran dan pendidikan. Hal ini mendorong peneliti untuk mengangkat *current issues* ini sebagai tema studi. Berdasarkan kerangka seperti itu, maka model yang merupakan produk dari studi ini disebut menggunakan pendekatan *problem*.

Dalam referensi lain pendekatan ini relatif identik dengan apa yang disebut sebagai *pendekatan konsentris*, suatu pendekatan yang digunakan untuk membahas berbagai konsep berdasarkan inti masalahnya (*core problems*) yang banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat umum, serta dihayati oleh semua orang.

(4) Pendekatan Tematis (Thematical Approach)

Model ini juga berdasarkan pada pendekatan tematis, yaitu suatu pendekatan yang dititik beratkan pada topik yang berbentuk tema yang meletakkan pusat telaahnya pada persoalan umum yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dengan demikian pendekatan ini membawa subjek didik untuk memahami persoalan yang mempunyai sifat-sifat umum dan bisa berlaku atau terjadi di mana saja.

5.3 Tujuan penerapan model

Secara umum, model pendidikan demokrasi ini memiliki tujuan membantu subjek didik untuk mengembangkan *sikap dan perilaku yang lebih demokratis*. Upaya ini dilakukan melalui pengelolaan asertivitas dan

dan atribusi subjek didik ke arah pemilikan atribusi yang lebih adjastif terhadap sikap dan perilaku demokratisnya pada masa lalu, sehingga lebih kondusif bagi pengembangan sikap yang lebih demokratis di masa selanjutnya, setelah perlakuan diberikan.

Menurut Alleman dan Rosaen (1991:128), membantu perkembangan perilaku subjek didik (*fostering behavior*), berpikir dan berbuat dengan nilai-nilai demokratis seperti keadilan, persamaan hak, kebebasan, dan harga diri, merupakan salah satu tujuan penting dalam pendidikan IPS. Langkah-langkah yang harus dilalui untuk membantu perkembangan perilaku itu antara lain pengembangan intelektual yang dibutuhkan sebagai prasyarat pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan upaya-upaya yang sesuai untuk meningkatkan interaksi antara struktur kognitif seorang individu dengan lingkungannya.

Dalam studi ini, interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya dirancang dalam seting dialogis antar anggota keluarga, untuk subjek penelitian yang berada dalam keluarga, dan sesama siswa untuk subjek penelitian di sekolah melalui evaluasi terhadap perilaku demokratisnya yang dijamin dengan teknik "*fair fighting*". Bentuk interaksi antara struktur kognitif dengan lingkungan dimunculkan melalui penggalian atribusinya terhadap perilaku demokratisnya tersebut. Rangsangan-rangsangan yang muncul merupakan bentuk reaksi

yang dihasilkan dari interaksi antara struktur kognitif yang dimiliki seorang individu (subjek didik) dengan lingkungan tersebut.

Dari aspek psikologis, model pendidikan demokrasi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif atribusional yang lebih adjastif terhadap pengalamannya dalam bersikap dan berperilaku demokrasi yang telah dijalani dalam kehidupannya. Dengan kemampuan ini, seorang individu secara motivasional akan lebih optimis untuk berperilaku lebih demokratis pada masa yang akan datang.

Para ahli psikologi yakin bahwa dengan atribusi yang adjastif (berdimensi internal, tidak stabil dan terkontrol) seorang individu akan bersikap tidak mudah menyalahkan orang lain pada peristiwa kegagalannya, akan tetapi lebih kepada kesadaran diri bahwa kegagalannya merupakan kekurangan yang dimilikinya. Pada saat yang sama, ia akan lebih menghargai penilaian yang diberikan pihak lain. Ini adalah bentuk yang identik dengan kemampuan menghargai pendapat orang lain, yang merupakan salah satu nilai demokratis yang dikembangkan dalam studi ini.

Pada dimensi tidak stabil dan terkontrol, berarti bahwa seorang individu (subjek didik) akan lebih optimis bahwa kelemahannya itu akan dapat diubah pada masa-masa selanjutnya. Perubahan yang akan dilakukannya adalah perubahan yang diyakini berada di bawah

pengendaliannya, bukan semata-mata terjadi secara kebetulan atau tidak juga disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kemampuannya.

5.4 Deskripsi Isi Model

Model pendidikan demokrasi ini diselenggarakan dalam setting dialogis, yaitu dalam proses interaksi antar sesama siswa dan antara siswa dan guru di sekolah, sesuatu yang belum banyak mendapatkan perhatian dalam proses pembelajaran di sekolah. Proses dialog di kelas (sekolah) sesungguhnya memiliki potensi yang cukup besar, mengingat karakteristik siswa yang relatif homogen, terutama dari segi umur dan tingkat pendidikan.

Model pendidikan demokrasi ini disusun dalam bentuk rangkaian prosedural yang terdiri dari tahap-tahap :

- (1) Perumusan masalah berkaitan dengan sikap dan perilaku demokratis
- (2) Identifikasi Sikap dan Prilaku Demokratis
- (3) Konfirmasi hasil identifikasi Sikap dan Prilaku Demokratis kepada para pihak
- (4) Refleksi dan Pemaknaan
- (5) Optimalisasi Sikap dan Perilaku Demokratis,

Rincian setiap tahap adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1 PROSEDUR PENYELENGGARAAN PENERAPAN MODEL PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM SITUASI INTERAKSI DIALOGIS

Langkah-langkah	Tujuan	Teknik/Prosedur
<p>1</p> <p>1. Perumusan dan orientasi masalah berkaitan dengan sikap dan perilaku demokratis.</p>	<p>2</p> <p>Agar siswa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenali fokus masalah berkaitan dengan konsep, sikap, dan perilaku demokratis 2. Memiliki fokus perhatian pada masalah-masalah tersebut 	<p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dialog dan diskusi 2. Curah pendapat (Brainstorming) (Ditekankan pada munculnya sebanyak mungkin masalah dan dihindari saling kritik atau evaluasi antar anggota keluarga)
<p>2</p> <p>Identifikasi Sikap dan Prilaku Demokratis</p>	<p>Agar masing-masing siswa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekam peristiwa yang terjadi dalam interaksi pergaulan sehari-hari berkaitan dengan sikap dan perilaku demokratis, dalam jangka waktu tertentu sesuai pedoman 2. Mengidentifikasi sikap dan perilaku demokratis masing-masing siswa dalam interaksi dialogis tersebut 3. Mengetahui tingkat sikap dan perilaku demokratisnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelacakan dengan "fair fighting" 2. Tes Penyelesaian Konflik (dalam bentuk kasus-kasus buatan) 3. Angket Pengukuran Asertivitas 4. Identifikasi Atribusi dengan Skala Atribusi

1	2	3
<p>3 Konfirmasi hasil identifikasi Sikap dan Prilaku Demokratis kepada para pihak</p>	<p>Agar masing-masing :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan informasi tentang sikap dan perilaku demokratisnya dari pihak lain 2. Memiliki kesiapan untuk mengatribusikan penyebab munculnya sikap dan perilaku demokratisnya 	<p>1. Penyerahan dan Analisis hasil identifikasi yang dilakukan dengan "fair fighting"</p> <p>2. Dialog interaktif tentang hasil identifikasi yang tidak jelas tetapi dengan menghindari evaluasi</p>
<p>4. Refleksi dan Pemaknaan</p>	<p>Agar setiap siswa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan refleksi terhadap hasil observasi yang dilakukan siswa lain 2. Menganalisis sebab-sebab munculnya sikap dan perilaku yang diobservasi (tingkat atribusi dan asertivitas) 3. Mengatribusikan secara benar situasi yang menyebabkan munculnya sikap dan perilaku yang diobservasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refleksi dan Rasionalisasi Atribusi anggota 2. Latihan Atribusi (Attribution Exercise) (Gordon, 1991) 3. Latihan berperilaku asertif 4. Dialog, tanya jawab, dan diskusi
<p>5. Optimalisasi Sikap dan Perilaku Demokratis</p>	<p>Masing-masing siswa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyadari keterbatasan dan kelebihan masing-masing 2. Meningkatkan kadar sikap dan perilaku demokratisnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian atribusi yang adjastif, dan perilaku yang lebih asertif secara deskriptif dan melalui contoh-contoh 2. Dialog, tanya jawab, dan diskusi

7. Cara Kerja Model Pendidikan Demokrasi

Dari deskripsi isi model, dapat dipahami bahwa di dalamnya tergambar suatu proses di samping struktur komponennya. Proses dan struktur komponen model ini secara skematis tertuang dalam diagram 5.1. Dalam diagram tersebut mudah dipahami bahwa basis dari model pendidikan demokrasi ini pada dasarnya adalah pengelolaan atribusi dan asertivitas siswa, yang didalamnya berlangsung proses dialog, proses afeksi dalam bentuk mempersepsi sesuatu objek (sikap dan perilakunya), merefleksi dan memodifikasi perilakunya ke arah yang lebih baik.

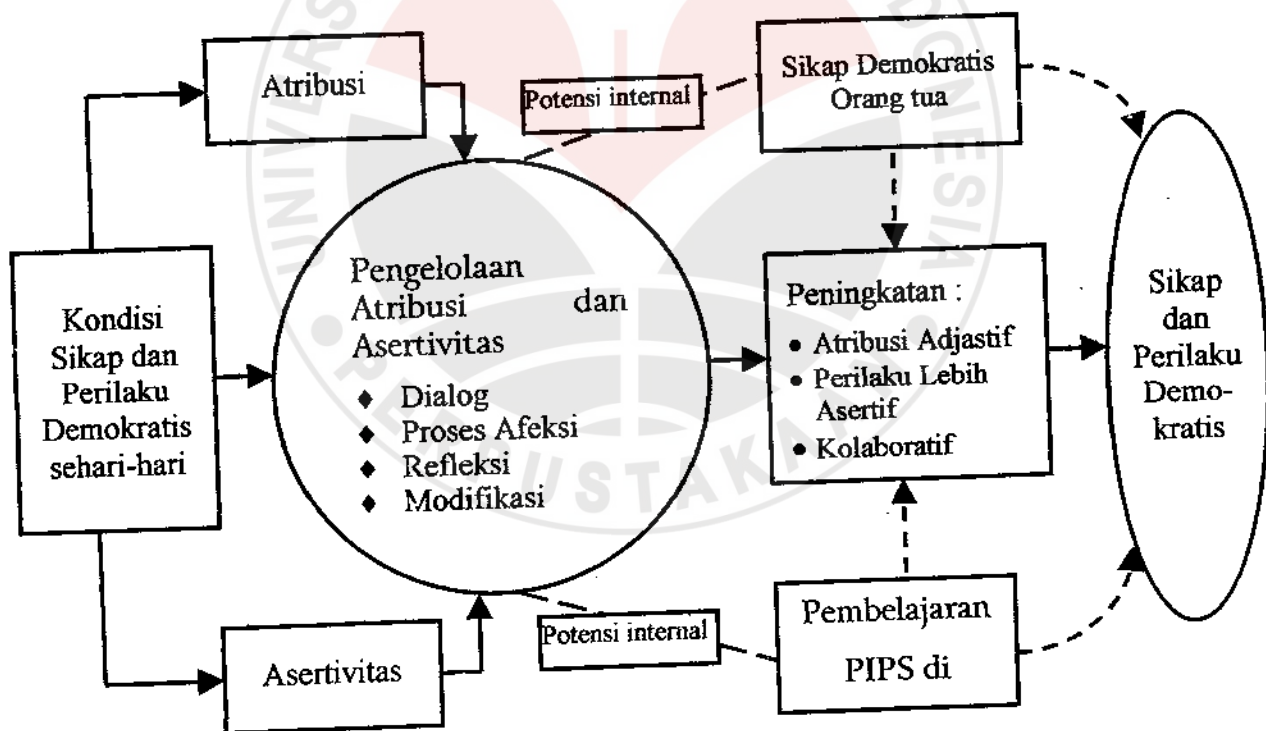


DIAGRAM 5.1 PARADIGMA MODEL PENDIDIKAN DEMOKRASI

Secara keseluruhan, proses yang tergambar itu dimulai dengan identifikasi tentang bagaimana seseorang (siswa) mengatribusikan kondisi sikap dan perilaku demokratisnya dalam kehidupan sehari-hari, demikian pula dengan tingkat asertivitasnya. Tingkat asertivitas dan atribusi itu dalam model ini merupakan raw input yang selanjutnya diproses dalam pengelolaan atribusi dan asertivitas. Sebagaimana dijelaskan di atas, pengelolaan meliputi proses dialog, proses afeksi, refleksi dan modifikasi perilaku (*behavioural modification*).

Pendekatan yang digunakan dalam proses ini adalah pemecahan masalah melalui penyelesaian konflik dan pendekatan persuasif. Karena itu aktivitas penting dalam model ini adalah melakukan pelacakan dan pengungkapan sikap dan perilaku demokratis oleh setiap pihak (siswa) terhadap pihak yang lain. Ketika fakta-fakta terungkap dan ditunjukkan kepada subjek yang diungkapkan, akan terjadi penolakan, sanggahan, bahkan mungkin akan terjadi sikap mempertahankan diri, dan kesemuanya akan tergantung kepada persepsi dan atribusi mereka terhadap fakta dan penyebab munculnya fakta-fakta tersebut. Moment ini akan digunakan untuk mengelola atribusi mereka agar lebih kondusif. Atribusi kondusif yang diharapkan muncul ialah atribusi internal, yaitu suatu kondisi psikis yang mengakui bahwa penyebab munculnya sikap itu adalah dari dalam dirinya sendiri dan *tidak perlu*

menyalahkan orang lain. Demikian pula atribusi yang "tidak stabil" yaitu keyakinan bahwa sikapnya apabila kurang demokratis, masih *terdapat peluang* untuk merubahnya.

Dalam proses sanggahan, penolakan, dan upaya pertahanan diri sebagaimana digambarkan di atas, sebenarnya telah menunjukkan akan muncul konflik. Karena itu, model ini dapat menggunakan salah satu teknik penanganan konflik yang memerlukan pihak ketiga. Dalam seting pendidikan sekolah (di kelas), maka pihak ketiga tentu saja adalah guru.

Menurut Gordon (1991:486) dalam situasi seperti digambarkan ini, peranan pihak ketiga (*third-party-interventions*) adalah sebagai penemu fakta (*fact-finder*), *mediator*, dan *arbitrator*. Sebagai mediator dan arbitrator, pihak ketiga dapat memainkan peranan *confrontational consultation*, dan *prosedural consultation*. Beberapa syarat yang dibutuhkan untuk berperan sebagai pihak ketiga dalam penanganan konflik seperti ini, menurutnya antara lain:

1. Mampu mendemonstrasikan keahliannya secara profesional dan menggunakan kontrol proses sosial.
2. Mengontrol situasi yang dikuasainya
3. Bersikap moderat dalam hal-hal yang prinsipil, yang bersifat isu, dan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang konflik

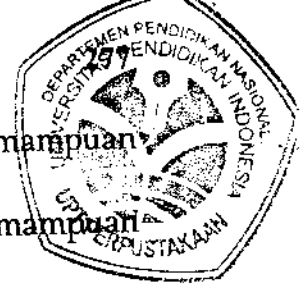
4. Bersikap netral atau seimbang, menggunakan pendekatan hubungan pribadi, dan menggunakan metode penyelesaian konflik.

Vliert (1985) yang dikutip oleh Gordon (1991) bahkan menyarankan pihak ketiga untuk meningkatkan konflik dalam taraf tertentu sebagai cara untuk meningkatkan kreativitas atau mencairkan isu-isu yang berkembang, dan akhirnya mengurangi dan memecahkan konflik. Pihak ketiga juga dapat mendorong untuk memperluas konflik kepada isu-isu yang berbeda atau memperkenalkan segi-segi baru sesuai tujuan. Peningkatan keterlibatan pihak ketiga akan memungkinkan menghasilkan bentuk-bentuk koalisi atau dapat juga memperbesar konflik.

Dalam studi ini, peranan pihak ketiga ditambah dengan peran sebagai pemampu (*enabling*) dan pemandu pembelajaran melalui tindak pengelolaan atribusi subjek. Hal itu dilakukan antara lain melalui dialog hasil "fair fighting" dan aktifitas lain yang termasuk dalam komponen model ini. Melalui "fair fighting" pihak ketiga dapat mendorong meningkatkan sikap dan perilaku dengan melakukan pembelajaran antara lain dengan cara menunjukkan cara-cara membuktikan alasan, pendirian, atau bukti-bukti oleh subjek didik (siswa).

Pengelolaan atribusi dan asertivitas ditujukan untuk meningkatkan atribusi yang lebih adjastif dari pada sebelumnya, perilaku yang

asertif, dan model interaksi yang lebih kolaboratif. Kemampuan berinteraksi yang lebih kolaboratif menggambarkan kemampuan berinteraksi yang lebih seimbang antara tingkat asertivitas dengan kemauannya bekerja sama dengan pihak lain.



8. Implementasi Model dalam Pembelajaran

Cara kerja model sebagaimana dipaparkan pada bagian terdahulu merupakan serangkaian prosedural yang sistematis. Setiap langkah mendukung tercapainya tujuan dari langkah yang lain. Apabila diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran di kelas, maka rangkaian prosedural tersebut akan tergambar sebagaimana pada tabel 5.2 berikut.

TABEL 5.2 IMPLEMENTASI MODEL DALAM PEMBELAJARAN

Langkah-langkah 1	Tujuan 2	Teknik/Metode 3
1. Orientasi konsep dan Identifikasi setiap Sikap dan Prilaku Demokratis yang diprogramkan dalam pembelajaran	1. Siswa mengenali fokus masalah berkaitan dengan konsep, sikap dan perilaku demokratis 2. Guru mengetahui secara umum sikap dan perilaku demokratis dalam pembelajaran	1. Dialog dan diskusi 2. Curah pendapat (Brainstorming)
2. Identifikasi Perilaku Asertif dan Atribusi Siswa	1. Siswa mengenali secara umum tingkat asertivitas dan atribusinya 2. Guru mengetahui secara umum tingkat aertivitas dan atribusi siswa	1. Dialog dan diskusi 2. Curah pendapat (Brainstorming) 3. Pengukuran sikap demokratis, asertivitas, dan atribusi siswa (disesuaikan dengan kebutuhan/sikap yang ikembangkan)

1	2	3
3. Menghubungkan Perilaku Asertif dan Tingkat Atribusi siswa dengan Sikap dan Perilaku Demokratis yang dikembangkan dalam pembelajaran	1. Siswa memahami hubungan tingkat atribusi seseorang dengan Sikap dan Perilaku Demokratis yang dikembangkan dalam pembelajaran 2. Siswa memahami hubungan tingkat asertivitas seseorang dengan Sikap dan Perilaku Demokratis yang dikembangkan dalam pembelajaran	1. Analisis bersama hasil identifikasi sikap demokratis, asertivitas, dan atribusi 2. Dialog interaktif tentang hasil identifikasi yang tidak jelas.
4. Optimalisasi Sikap dan Perilaku Demokratis yang dikembangkan dalam pembelajaran	Agar setiap siswa : 1. Menyadari keterbatasan dan kelebihan masing-masing 2. Menganalisis bentuk dan sebab-sebab munculnya sikap dan perilaku yang diidentifikasi (tingkat atribusi dan asertivitas) 3. Mengatribusikan secara benar situasi yang menyebabkan munculnya sikap dan perilaku yang diidentifikasi 4. Meningkatkan kadar sikap dan perilaku toleran dan kerja samanya	1. Refleksi dan Rasionaisasi Atribusi yang dimiliki 2. Latihan Atribusi (Attribution Exercise) (Gordon, 1991) 3. Latihan berperilaku asertif, melalui teknik Saling Menilai dan Tes Penyelesaian Konflik 4. Dialog, tanya jawab, dan diskusi 5. Penyajian atribusi yang adjastif, dan perilaku yang lebih asertif secara deskriptif dan melalui contoh-contoh (Implementasinya dipilih sesuai dengan nilai/ Sikap dan Perilaku Demokratis yang dikembangkan)

Berdasarkan kajian teoretik sebagaimana dipaparkan pada bab II, maka terdapat 10 macam nilai demokrasi yang dikembangkan, yaitu: (1) keyakinan bahwa kekuasaan adalah milik Tuhan semata, (2) toleransi, (3) menghargai pendapat orang lain, (4) kemauan bekerja

sama dengan pihak lain, (5) kemauan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, (6) tidak konsumtif, (7) berpikir kritis, (8) sensitif terhadap kesulitan orang lain, (9) kemauan untuk berpartisipasi dalam lapangan sosial dan politik, dan (10) memahami dan menerima perbedaan kultur dalam masyarakat.

Untuk lebih memperjelas prosedur tentang bagaimana model pendidikan demokrasi ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas, berikut ini disajikan satu contoh satuan program pembelajaran yang didasarkan pada model ini. Satuan program pembelajaran ini dilaksanakan dan diintegrasikan dalam mata pelajaran PPKn di Kelas II SLTP. Nilai/sikap dan perilaku demokratis yang dikembangkan dalam satuan program pembelajaran ini adalah 3 dari 10 nilai demokrasi, yaitu sikap toleran, kemauan bekerja sama, dan menerima perbedaan/keragaman kultur dalam masyarakat.

CONTOH FORMAT SATUAN RPOGRAM PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran	: PPKn
Pokok Bahasan	: Kerja sama
Sub Pokok Bahasan	: 1. Toleransi 2. Kerja sama antar umat beragama 3. Keragaman Kultur dalam Masyarakat
Waktu	: 4 X 45 menit

Tujuan Umum Pembelajaran

Siswa memahami dan menerima perbedaan agama dan budaya sebagai kenyataan yang ada di engah-tengah masyarakat, bersikap toleran, serta berperilaku dan berkemauan untuk bekerja sama dengan pihak lain.

Tujuan Khusus Pembelajaran

1. Siswa dapat memahami bahwa perbedaan agama dan perbedaan kultur dalam masyarakat adalah kenyataan alami.
2. Siswa menerima perbedaan agama dan kultur dalam masyarakat sebagai kekayaan dan rahmat bagi bangsa Indonesia.
3. Siswa memiliki sikap toleran terhadap berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat.
4. Siswa memiliki sikap yang mau bekerja sama dengan pihak lain yang berlainan agama dan atau kultur dalam masyarakat.
5. Siswa menunjukkan perilaku yang mau bekerja sama dengan pihak lain.

Materi Pembelajaran

1. Memilih sesuatu agama adalah hak asasi setiap manusia yang tidak boleh diintervensi pihak lain.
2. Dalam ajaran agama, tak ada paksaan untuk memeluk sesuatu agama.
3. Agama sangat mengajarkan umatnya agar bersikap dan berperilaku toleran dengan pihak lain
4. Hidup rukun dan kerja sama antar umat sangat dianjurkan dalam agama.
5. Perbedaan kultur dalam masyarakat adalah kenyataan yang tak dapat dipungkiri siapapun

6. Tak ada yang bernilai lebih tinggi dan tak ada pula yang lebih rendah di antara berbagai jenis etnis dan kultur yang ada dalam masyarakat.
7. Untuk mencapai tujuan bersama (dalam perbedaan) dalam hidup ini, maka sangat dibutuhkan sikap dan perilaku yang mau bekerja sama satu sama lain.

Prosedur Pembelajaran

Prosedur pembelajaran dirumuskan sebagai berikut:

Langkah-langkah	Tujuan	Teknik/Metode
1	2	3
2. Orientasi konsep dan Identifikasi Sikap dan Prilaku Toleran dan Kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa mengenali fokus masalah berkaitan dengan konsep, sikap toleran, kerja sama, dan menghargai keragaman 2. Guru mengetahui secara umum sikap toleran dan kerja sama siswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dialog dan diskusi 2. Curah pendapat (Brainstorming)
3 Menghubungkan Perilaku Asertif dan Tingkat Atribusi siswa dengan Sikap Toleran dan Kerja sama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa memahami hubungan tingkat atribusi dan asertivitas seseorang dengan sikap toleran 2. Siswa memahami hubungan tingkat atribusi dan asertivitas seseorang dengan kemauan bekerja sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan dan Analisis hasil identifikasi melalui teknik saling menilai, asertivitas, dan atribusi 2. Dialog interaktif tentang hasil identifikasi yang tidak jelas tetapi dengan menghindari evaluasi

	<p>3. Siswa memahami hubungan tingkat atribusi dan asertivitas seseorang dengan sikap menghargai keragaman agama dan budaya</p>	
<p>4. Optimalisasi Sikap dan Perilaku Toleran, kerja sama, dan kemauan menghargai keragaman agama dan budaya</p>	<p>Agar setiap siswa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyadari keterbatasan dan kelebihan masing-masing 2. Menganalisis bentuk dan sebab-sebab munculnya sikap dan perilaku yang diidentifikasi (tingkat atribusi dan asertivitas) 3. Mengatribusikan secara benar situasi yang menyebabkan munculnya sikap dan perilaku yang diidentifikasi 4. Meningkatkan kadar sikap dan perilaku toleran dan kerja samanya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refleksi dan Rasionalisasi Atribusi yang dimiliki 2. Latihan Atribusi (Attribution Exercise) (Gordon, 1991) 3. Latihan berperilaku asertif (teknik saling menilai & peny. Konflik) 4. Dialog, tanya jawab, dan diskusi 5. Penyajian atribusi yang adjustif, dan perilaku yang lebih asertif secara deskriptif dan melalui contoh-contoh

Metoda Pembelajaran

1. Ceramah dan tanya jawab
2. Dialog dan diskusi
3. Latihan Atribusi, latihan berperilaku Asertif, dan
4. Refleksi Sikap

Alat dan Media

1. Alat-alat Kelas
2. Lembaran Saling Menilai
3. Lembaran Kasus (Penyelesaian Konflik)
4. Angket Indikator Perilaku Asertif
5. Skala Atribusi

Penilaian

Penilaian dilakukan dengan instrumen

1. Skala Sikap
2. Skala Atribusi
3. Angket Indikator Perilaku Asertif

Atribusi yang adjastif, perilaku yang asertif, dan kemampuan berinteraksi yang kolaboratif pada akhirnya diharapkan akan mampu meningkatkan sikap dan perilaku yang lebih demokratis. Secara teoretis, pola hubungan dan keterpengaruhan dari berbagai variabel tersebut telah dibahas pada bagian terdahulu.

Meskipun tidak secara langsung, sikap orang tua (ayah dan ibu) ikut memberi kontribusi terhadap proses peningkatan atribusi yang adjastif, asertivitas, dan kolaboratif. Terhadap sikap dan perilaku demokratis anak, secara teoretis sikap orang tua diyakini memiliki pengaruh yang cukup besar. Akan tetapi, secara empirik hubungan sikap orang tua terhadap sikap dan perilaku demokratis anak tidak cukup signifikan. Karena itu, dalam diagram tersebut digambarkan dalam bentuk garis yang terputus-putus.

Bagaimanapun, orang tua diharapkan perannya dalam mendukung perkembangan sikap anak-anaknya ke arah sikap dan perilaku yang lebih demokratis. Peran tersebut terutama diberikan dalam membentuk suasana dan dinamika kehidupan keluarga yang dinamis dan demokratis. Peran orang tua ini, terutama karena berdasarkan informasi empirik, variabel dinamika/suasana keluarga cukup signifikan dalam hubungannya dengan perkembangan sikap dan perilaku demokratis.

Pembelajaran IPS di sekolah, juga cukup signifikan dalam memberi kontribusi terhadap perkembangan sikap dan perilaku demokratis siswa. Karena itu, pembelajaran IPS di sekolah juga amat didorong untuk secara sinergi menerapkan model ini, dalam rangka meningkatkan sikap dan perilaku demokratis siswa. Guru dalam hal ini memainkan peranan penting.

Bentuk peranan guru, dalam model ini terutama adalah pada tindakan pengelolaan atribusi dan asertivitas. Sekali lagi pengelolaan itu diarahkan agar atribusi siswa lebih adjastif, dan perilakunya lebih asertif dari sebelumnya. Demikian pula dengan kemampuannya dalam berinteraksi agar mengarah kepada pola yang kolaboratif. Kesemuanya itu, pada akhirnya diarahkan agar sikap dan perilaku siswa lebih demokratis.

Dalam keseluruhan proses itu, potensi internal yang dimiliki masing-masing siswa adalah sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Karena itu, dalam setiap tindakan, semua pihak yang terlibat (terutama guru di sekolah) hendaknya memperhitungkan potensi internal siswa ini sebagai kondisi yang merupakan *individual deferencies* yang harus dikelola. Karena itu, dalam model ini layanan individual meskipun dalam setting klasikal amat disarankan.

Jelaslah, bahwa model pendidikan demokrasi ini diselenggarakan dalam setting kelas di sekolah. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan model ini ialah teman-teman sebaya di kelas sebagai partner dialog, dan guru sebagai pengelola yang melakukan fasilitasi dan advokasi dalam meningkatkan atribusi ke arah yang lebih adajastif, dan kolaboratif, serta perilaku yang lebih asertif, ke arah peningkatan sikap dan perilaku yang lebih demokratis. Keduanya ditempatkan sebagai pihak yang utama.

Pihak lain yang didorong untuk terlibat dalam model ini ialah orang tua, yang diharapkan dapat memainkan peran menciptakan suasana dan dinamika keluarga yang dinamis dan kondusif. Secara skematis proses dan komponen yang dilibatkan dalam model ini adalah sebagaimana tertuang dalam diagram 5.1.

5.7 Keterbatasan model

Sebagaimana lazimnya setiap produk dari suatu upaya seperti model pendidikan ini, selalu saja memiliki keterbatasan tertentu. Beberapa keterbatasan dalam model ini antara lain adalah keterbatasan yang terbawa baik oleh substansi materi yang dibahas, teori yang dirujuk sebagai landasan, maupun keterbatasan yang ada pada dimensi metodologis.

Keterbatasan Pertama, substansi materi yang dibahas, yaitu bahwa konsep *demokrasi* adalah suatu konsep atau bahkan bentuk generalisasi dari berbagai konsep yang sangat *interpretable*. Banyak ahli ilmu sosial yang memandang konsep ini dengan berbagai penafsirannya sendiri-sendiri. Hal itu bisa terjadi, baik karena latar belakang sosial budaya tempat mereka tinggal, maupun akibat akumulasi pengalaman, pemikiran dan sosialisasi yang dialaminya. Perbedaan penafsiran terhadap konsep demokrasi menyebabkan kesulitan bagi kita apabila ingin melakukan transformasi nilai-nilainya yang dapat memuaskan semua pihak.

Rumusan tentang apa itu demokrasi memang masih amat beragam dan seringkali menjadi bahan diskusi yang cukup panjang. USIA (1991), misalnya mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan konsep yang masih sering disalah pahami, sehingga dapat

disalahgunakan oleh rezim-rezim totaliter dan diktator manakala mereka berusaha memperoleh dukungan rakyat dengan menempelkan label demokrasi. Untuk mendapatkan gambaran yang memuaskan semua pihak dengan demikian, ucapan Abraham Lincoln yang terkenal itu bahwa demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat, tidaklah cukup.

USIA (1991) menjelaskan bahwa demokrasi bukan sekedar seperangkat aturan dan prosedur konstitusional yang menentukan bagaimana suatu pemerintah berfungsi. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi, partai politik, organisasi dan asosiasi. Artinya, demokrasi tidak hanya diperlukan dalam konteks kehidupan politik dalam berbangsa dan bernegara, akan tetapi demokrasi juga merupakan tatanan hidup yang diperlukan dalam setiap tingkat kehidupan masyarakat yang didalamnya memuat bentuk-bentuk interaksi antar anggotanya.

Demikian juga dalam tatanan kehidupan keluarga, dan di sekolah, nilai-nilai demokrasi amatlah diperlukan. Sekolah bahkan merupakan tempat terbaik untuk melakukan pendidikan, mengingat keberadaannya yang didisain untuk itu. Penghargaan bagi setiap siswa, kesediaan mendengar dan mengakomodasi pendapat siswa oleh siswa

lainnya, rasa empati, pengakuan hak-hak setiap siswa, kesediaan untuk menerima perbedaan dan hal-hal lain yang merupakan sendi-sendi demokrasi amat diperlukan manifestasi dan aplikasinya dalam kehidupan keluarga. Namun demikian, dari perbedaan pandangan itu masih dapat ditarik benang merah yang dianggap sebagai esensi dari konsep demokrasi.

Kata kunci dari demokrasi menurut rumusan dari USIA, (1991) sebagaimana dikutip di atas adalah kebebasan. Mungkin saja rumusan tentang demokrasi seperti itu tidak serta merta cocok dengan masyarakat bangsa kita pada tataran aplikasinya, mengingat masyarakat bangsa kita memiliki karakteristik khas, meskipun sendi-sendi yang esensial adalah bersifat universal. Karena itu, bagaimanapun kita masih memerlukan rumusan yang mendekati representasi masyarakat kita untuk dikembangkan dan disosialisasikan melalui lembaga keluarga dan sekolah dalam rangka mengembangkan budaya politik yang mampu mendukung lahirnya bangsa dan masyarakat madani yang demokratis.

Dalam masyarakat Islam, esensi demokrasi tercermin dalam konsep-konsep kesamaan derajat manusia, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan kedaulatan rakyat yang merupakan manifestasi dari pengakuan bahwa kekuasaan adalah amanat Allah yang harus dipertanggung jawabkan baik kepada sesama manusia (Rakyat)

maupun secara langsung kepada Tuhan yang memiliki kekuasaan itu. Nilai implementatifnya tertuang dalam konsep-konsep dan prosedur-prosedur yang sudah lama mengakar dalam masyarakat Islam, yaitu musyawarah (syuura), mufakat/kesepakatan (ijma'), dan kebebasan ekspresi dalam penilaian interpretatif yang mandiri (ijtihad) (Eposito dan Voll, 1999:32).

Achmad Sanusi (1998 dan 1999) membahas gagasan tentang konsep demokrasi yang berkembang dan dianggap lebih representatif apabila diadopsi untuk masyarakat bangsa Indonesia. Konsep tentang demokrasi itu memuat karakteristik esensial, yang disebut sebagai sepuluh pilar demokrasi. Kesepuluh pilar tersebut adalah: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Hak asasi manusia, (3) Kedaulatan rakyat, (4) Kerakyatan yang cerdas, (5) Pembagian kekuasaan negara, (6) Otonomi daerah, (7) Rule of Law, (8) Pengadilan yang merdeka, (9) Kemakmuran umum, dan (10) Keadilan sosial.

Dalam kondisi diskusi seperti itulah dan bahkan lebih luas lagi, model ini dikembangkan. Karena itu, keterbatasan dari segi ini tidak dapat dihindari. Dari keseluruhan deskripsi tentang nilai-nilai demokrasi sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, dapat direduksi ke dalam prinsip-prinsip dasar dalam bentuk nilai-nilai demokrasi yang esensial. Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat menjadi

landasan bagi seseorang dalam bersikap dan berperilaku demokratis. Karena itu, prinsip-prinsip dasar yang berbentuk nilai-nilai tersebut dijadikan acuan dan indikator dalam sikap dan perilaku berdemokrasi subjek didik. Prinsip-prinsip dasar dimaksud adalah: (1) ketaqwaan (mengakui bahwa kekuasaan di tangan siapapun merupakan pemberian dan amanat Tuhan Yang Maha Esa), (2) toleransi, (3) kemauan bekerja sama dengan orang lain, (4) menghargai pendapat orang lain, (5) memahami dan menerima perbedaan kultur dalam masyarakat, (6) berpikir kritis dan sistemik, (7) kemauan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, dan sesuai dengan bentuk konflik (8) kemauan merubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif untuk kepentingan bersama, (9) sensitif terhadap kesulitan orang lain, dan (10) kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial (Cogan, 1997).

Singkatnya, keterbatasan itu tercermin dari luasnya cakupan konsep demokrasi yang di-breakdown sedemikian rupa, sehingga applicable untuk keperluan pendidikan. Hal ini menyebabkan tidak seluruh cakupan makna demokrasi dapat terakomodasi dalam model ini, termasuk keluasan lapangan implementasinya.

Keterbatasan kedua, sebagai bentuk keterbatasan yang lain juga terdapat pada teori yang menjadi landasan eksplanasinya, antara lain

teori atribusi yang diangkat dari khasanah psikologi. Gagasan pokok dalam studi ini ialah bagaimana mendapatkan acuan tentang interaksi pendidikan dalam keluarga yang dapat digunakan untuk melaksanakan pendidikan demokrasi sebagai salah satu aspek dalam Pendidikan IPS. Alternatif yang diajukan ialah mengembangkan model pendidikan yang diprediksi mampu membantu orang tua dan anak-anak mereka untuk memberdayakan dirinya melalui interaksi dialogis untuk mempertahankan dan meningkatkan pemahaman sikap dan perilaku demokratisnya.

Upaya mempertahankan dan meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku demokratis itu dilakukan melalui pemanfaatan atribusi mereka mengenai kedua variabel tersebut. Untuk keperluan ini, konsep tentang atribusi dianggap relevan dipadukan agar memberi kontribusi sesuai kekuatannya.

Akan tetapi, sebagaimana juga yang dialami kebanyakan teori, preskripsi yang terkandung dalam teori atribusi ini juga tidak terbebas dari berbagai kritik, sulit mencari titik temu yang diyakini semua pihak. Weiner (1992) misalnya, yang banyak dirujuk oleh banyak penulis, mempreskripsikan bahwa atribusi yang adjastif adalah atribusi yang berdimensi *internal, tidak stabil, dan terkontrol*. Akan tetapi, di pihak yang lain terdapat pula preskripsi atribusi berdimensi eksternal justru

yang lebih adjastif, khususnya pada kondisi kegagalan. Wilson dan Lenville (1982), misalnya menyebutkan bahwa atribusi internal amat berpotensi untuk menimbulkan rasa malu dan penyesalan yang bermuara kepada ketidakberdayaan. Demikian juga atribusi tidak stabil dan terkendali, cenderung menghasilkan sikap percaya diri berlebihan (*overconvidence*) yang mengarah kepada sikap yang tidak demokratis.

Mengatasi keterbatasan seperti ini, peranan pihak ketiga (*third-party-interventions*), seperti orang tua di dalam keluarga dan guru di sekolah dituntut untuk memahami antecedent teori dan melakukan pilihan untuk menetapkan kadar tertentu penggunaannya secara tepat. Ketepatan itu akan amat menentukan keberhasilan mengelola atribusi subjek mengarah ke atribusi yang lebih adjastif dan kondusif untuk menerima kritik pihak lain dan menghargainya. Inilah kekuatan yang ada untuk mengarah kepada pembentukan sikap yang lebih demokratis pada masa selanjutnya.

Dalam konteks ini, keterbatasan juga terdapat pada penghindarannya pada pembahasan kompleksitas teori ini secara lebih mendalam. Hal ini dilakukan mengingat bahwa fokus bahasan bukan pada lapangan preskripsi terapi psikologis, bahasan berada pada lapangan pendidikan IPS yang memang menggunakan salah satu pendekatan yang dimilikinya, yaitu transdisiplin. Karena itu, teori ini

dipinjam untuk diambil benang merah manfaatnya yang segera terlihat, yaitu kekuatannya untuk melihat citra diri dan kenyataan untuk mengakui kesalahan apabila terdapat kegagalan, dan menghargai pendapat orang lain dalam bentuk apapun, termasuk dalam evaluasi. Inilah yang dianggap sebagai akselerator bagi tumbuh kembangnya sikap dan perilaku demokratis.

5.8 Kelebihan Model

Dari segi kepraktisan, model ini terbukti dapat diimplementasikan baik dalam seting keluarga, maupun dalam seting sekolah pada siswa SLTP, sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara dialogis, dan melibatkan guru di sekolah sebagai pihak ketiga yang mengelola atribusi subjek. Bagaimanapun, hal ini telah menunjukkan bahwa model pendidikan ini memiliki kelebihan berupa tingkat aplikabilitas yang cukup tinggi. Hal itu juga dimungkinkan berkat prosedur model yang disusun secara sederhana dan mudah dipahami oleh kebanyakan orang.

Dilihat dari segi kebutuhan metodologis pendidikan, menyederhanakan materi pembelajaran berupa nilai-nilai demokrasi yang abstrak kepada aplikasinya dalam bentuk yang mudah dihayati dan dilaksanakan dalam bentuk sikap dan perilaku merupakan kelebihan yang lain. Demikian juga, tingkat relevansinya dengan kebutuhan pendidikan saat ini juga merupakan kelebihan yang lain lagi. Pada saat masyarakat

merasakan bahwa sikap demokratis amat diperlukan dalam hidup bermasyarakat seperti sekarang ini, kontribusi model ini merupakan salah satu upaya solusi yang cukup relevan.

